



RABU, 06 FEBRUARI 2019

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dewan Dorong Usut Proyek Tandon

BENGKULU - Aparat penegak hukum diminta untuk mengungkapkan dugaan kesalahan yang terjadi pada proyek pembangunan tandon air di eks lokasi 2017 lalu. Sehingga tahu penyebab proyek yang didanai oleh APBD Provinsi Bengkulu senilai Rp 342 juta tersebut bisa gagal total. Apalagi saat ini bangunan tandon air dengan nilai fisik 35 persen itu dalam kondisi rusak dan tidak bisa dilanjutkan pembangunannya.

Yang menjadi soal, rekanan sudah menggunakan uang negara Rp 103 juta sebagai uang muka proyek tersebut.

► Baca *DEWAN...Hal 7*



HELMI PAMAN

“Karena proyek tidak selesai kontraktor harus bertanggungjawab,”

Sambungan dari halaman 1

Anggota DPRD provinsi Bengkulu Helmi Paman mengatakan harus diuraikan dengan jelas apa penyebab gagalnya proyek ini. Sehingga bisa diketahui apakah dari pelaksanaan atau juga dari perencanaan. “Penegak hukum tidak apa masuk jika menemukan adanya indikasi permasalahan dalam proyek tandon air ini,” kata Helmi Paman.

Dia mengatakan dalam proyek ini rekanan mencairkan uang muka. Kemudian pengguna anggaran tidak berani mencairkan sisa anggarannya sesuai kontrak. Lantaran rekanan tidak mampu menyelesaikan proyek tersebut. Apalagi saat dihitung pekerjaan mereka hanya lebih kurang 35 persen. Kemudian akhirnya dilakukan pemutusan kontrak. “Tidak mencairkan sisanya karena memang belum selesai, katanya.

Terkait hal ini harusnya Dinas Kelautan dan Perikanan langsung melakukan klaim atau jaminan pelaksanaan atau asuransi dari rekanan yang mengerjakan proyek itu. Sebab seluruh paket proyek syarat-

nya harus ada jaminan pelaksanaan yang diletakkan di bank. Jika terjadi wanprestasi, maka pengguna anggaran bisa mencairkan jaminan pelaksanaannya itu.

“Harus dikejar, jaminan pelaksanaannya diletakkan di bank mana. Kemudian harus dicairkan sebagai jaminan. Karena rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya,” terang Helmi Paman.

Dia mengatakan DKP harus memiliki kajian terhadap dengan permasalahan itu. Dimana letak kesalahan sehingga rekanan gagal menyelesaikan pekerjaannya. Mencari akar permasalahannya dimana. DKP sekarang bisa menuruti rekanan dan memanggilnya. Jika memang belum memproses jaminan pelaksanaan harus diproses. “Karena proyek tidak selesai kontraktor harus bertanggungjawab,” terangnya.

Kecuali jika gagalnya proyek itu dikarenakan adanya bencana alam atau force majeure. Ini bisa di maklumi. Tetapi kalau karena salah perencanaan, atau karena kesalahan rekanan itu harus dipertanggungjawabkan. Sebab uang yang digunakan

untuk membangun tandon air itu adalah uang rakyat. “ini harus dipertanggungjawabkan” terangnya.

Dia menjelaskan, aset tandon air yang tidak bisa dipakai itu masih tercatat sebagai aset milik Pemda Provinsi Bengkulu. Walaupun tidak bisa digunakan. Tidak bisa saja dihapus, karena ada mekanisme atau proses penghapusan ya. “Ini harus diungkapkan,” katanya.

Sebelumnya Prof. Herlambang juga mengatakan dalam sebuah proyek itu dimulai dari design perencanaan, penentuan lokasi, kemudian pelaksanaan serta pemasaran atau pemanfaatan saat proyek itu sudah selesai dibangun. Jika perencanaan bagus, pemilihan lokasi pembangunannya tepat dan rekanan yang mengerjakan juga baik, maka proyek tidak akan gagal. Kemudian dalam segi pemanfaatannya ketika pemasarannya baik, maka aset itu akan termanfaatkan dengan baik

“Harus dilihat dulu apakah perencanaannya sudah betul atau tidak. Lokasinya sudah tepat atau belum dan rekanan yang mengerjakannya benar atau tidak,” tutupnya. (del)